Analisis Kebijakan Pengelolaan ZIS untuk Dana Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Arza Amelia Tiara Putri¹, Elly Nurlaili², Aprilianti³

^{1,2,3} Universitas Lampung

e-mail: arza.amelia21@student.unila.ac.id

Abstrak

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia mengikuti ketentuan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melakukan tahapan tersebut secara efektif dalam alokasi dana untuk amil, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Fatwa MUI, di mana amil berhak menerima maksimal 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Jika dana zakat tidak mencukupi untuk hak amil, BAZNAS dapat mengambil maksimal 20% dari dana infak, sedekah, atau bantuan (hibah) pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : *Pengelolaan ZIS, BAZNAS, Hak Amil Zakat*

Abstract

Zakat management is regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, which includes planning, implementation, and coordination activities in the collection, distribution, and utilization of zakat. BAZNAS as a zakat management institution in Indonesia follows this provision. The results of the study indicate that BAZNAS Bandar Lampung City has carried out these stages effectively in allocating funds for amil, in accordance with the provisions of the law and the MUI Fatwa, where amil is entitled to receive a maximum of 12.5% of the zakat funds collected. If the zakat funds are insufficient for the amil's rights, BAZNAS can take a maximum of 20% of the infak, sedekah, or assistance (grant) funds of the Bandar Lampung City regional government.

Keywords: *ZIS Management, BAZNAS, Zakat Amil Rights*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sesudah sholat apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Dalam Al-Quran perintah sholat dan zakat sering kali disandingkan menunjukkan keterkaitan erat antara kedua ibadah tersebut. Sholat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. (*hablumminallah*) yang menjadi landasan keimanan dan ketaatan, sedangkan zakat merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*) yang dapat menumbuhkan kepedulian sosial dan keadilan ekonomi (Siregar, 2023).

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 Point 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan serta pendistribusian zakat secara nasional hingga tingkat kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Selain zakat, BAZNAS juga menerima infak dan sedekah, yang pengelolaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan dicatat secara transparansi dan akuntabilitas (Sarinah, 2024).

Dana zakat yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk dana operasional bagi amil zakat yang bertugas. Hak amil zakat diatur dalam

undang-undang, dengan batas maksimal sebesar 12,5% dari total pengumpulan. Dana ini digunakan untuk gaji, operasional, dan promosi kegiatan zakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat (Rezeki, 2023).

Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun, namun penghimpunan dana infak dan sedekah cenderung lebih besar dibandingkan zakat. Dana yang dikumpulkan dialokasikan berdasarkan prioritas untuk *mustahik* (penerima zakat) yang berhak, serta untuk kemaslahatan umum (Kuswono, 2022).

BAZNAS Kota Bandar Lampung wajib menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan ZIS. Hal ini termasuk menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik dan melakukan audit secara berkala setiap tahunnya melalui pihak audit kepatuhan syariah serta Kantor Akuntan Publik (KAP).

Peran amil sangat penting dalam memastikan zakat terdistribusi secara efektif. Namun, keterbatasan jumlah amil yang profesional menjadi tantangan bagi lembaga zakat. Fatwa MUI menekankan pentingnya peran amil, terutama dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan adil.

Jika lembaga amil gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berhasil dilaksanakan. Lembaga-lembaga zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi seperti kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan zakat (Hakim, 2020). Pengalokasian hak amil jika tidak tercukupi maka diambil dari dana *fisabilillah*. Apabila dana *fisabilillah* masih belum tercukupi juga maka diambil dari dana infaq sedekah sebesar 20% dari dana yang sudah terkumpulkan. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pengelolaan ZIS dalam dalam alokasi dana untuk amil di BAZNAS kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui apakah Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang ada?.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh di proses dengan metode pengolahan data, yaitu identifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematika data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif (Nursapiah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dilakukan secara tepat, transparan, dan efektif. Melalui perencanaan yang matang, BAZNAS dapat menetapkan target pengumpulan, merancang strategi pendistribusian, serta menentukan prioritas program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Dengan adanya perencanaan yang baik, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi target penerima manfaat (*mustahik*) dan potensi zakat yang dapat dikumpulkan. BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan pemetaan

wilayah untuk mengetahui jumlah penduduk miskin dan kelompok yang membutuhkan bantuan. Selain itu, BAZNAS juga mengidentifikasi potensi zakat dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Identifikasi potensi ini menjadi dasar dalam menyusun target pengumpulan ZIS yang realistis setiap tahunnya, berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi, BAZNAS Kota Bandar Lampung menetapkan target pengumpulan ZIS tahunan yang disusun dengan analisis yang cermat. Penetapan target ini bertujuan untuk memacu semangat pengelola zakat dalam mengoptimalkan sosialisasi dan pengumpulan dana dari para muzakki. Target yang ditetapkan juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja BAZNAS, sehingga pencapaian dapat dipantau dan dievaluasi. Selain itu, strategi pengumpulan zakat dioptimalkan dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat, serta dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.

Selain fokus pada pengumpulan, perencanaan pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung juga mencakup strategi pendistribusian yang tepat sasaran. Dalam hal ini, BAZNAS menyusun mekanisme evaluasi dan monitoring untuk mengukur keberhasilan setiap program yang dijalankan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan apakah target pengumpulan tercapai dan apakah dana yang dikumpulkan sampai kepada mustahik dengan cara yang efektif. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan zakat dan merumuskan perencanaan program pada tahun berikutnya, sehingga kualitas pelayanan BAZNAS dapat terus ditingkatkan.

Dalam menghadapi era digital, BAZNAS Kota Bandar Lampung memanfaatkan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Dengan sistem informasi berbasis teknologi, BAZNAS dapat memantau dan melaporkan seluruh alur pengelolaan zakat dari pengumpulan hingga pendistribusian. Penggunaan sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat secara cepat dan transparan. Dengan begitu, BAZNAS dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS yang dilakukan.

Perencanaan pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini dirancang untuk memperluas jaringan, memperkuat dukungan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta meningkatkan efektivitas program-program yang ada. Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara lebih optimal.

Agar dapat memperkuat perencanaan jangka panjang, BAZNAS Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja untuk lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan dan dewan pengawas yang berkoordinasi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai rencana kegiatan jangka pendek, yang harus mencakup rincian kegiatan dan anggaran untuk mencapai target tahunan. Melalui perencanaan yang terstruktur ini, BAZNAS dapat memastikan pengelolaan ZIS berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Bandar Lampung dimulai dengan proses pengumpulan dana yang dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengumpulan langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dilakukan di kantor-kantor BAZNAS yang menerima

zakat dari masyarakat maupun lembaga, sementara pengumpulan tidak langsung difasilitasi melalui kanal digital seperti website, aplikasi mobile, dan kerjasama dengan berbagai bank. Teknologi ini mempermudah masyarakat untuk berzakat secara online, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan transaksi yang aman dan cepat. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Bandar Lampung berusaha untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dana dengan memanfaatkan platform digital yang semakin banyak digunakan masyarakat.

Setelah dana terkumpul, BAZNAS Kota Bandar Lampung menjalankan tahap pencatatan dan dokumentasi yang transparan serta akuntabel. Setiap transaksi yang terjadi, baik tunai maupun digital, dicatat dengan rinci untuk memudahkan audit dan memastikan dana yang diterima tercatat dengan baik. Pencatatan ini tidak hanya mencakup jumlah dana, tetapi juga identitas muzakki, jenis zakat yang diberikan, dan rincian penerimaan lainnya. Proses dokumentasi yang rapi ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan klasifikasi mustahik, atau penerima zakat. BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki tim khusus yang melakukan survei dan verifikasi untuk memastikan bahwa zakat disalurkan tepat kepada pihak yang berhak, sesuai dengan syariat Islam. Mustahik yang berhak menerima zakat mencakup kategori seperti fakir, miskin, fisabilillah, dan gharimin. Verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keadilan dalam distribusi zakat, sehingga bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat dengan efektif.

Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung dilakukan secara terencana dan berdasarkan prioritas kebutuhan. Proses distribusi dibagi menjadi dua kategori utama: konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif mencakup bantuan langsung untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sementara distribusi produktif memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Program-program ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga dapat mandiri secara ekonomi, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menjadi muzakki yang berkontribusi dalam pengumpulan zakat di masa depan.

Selain itu, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan serta bantuan modal usaha untuk keluarga miskin. Program ini dirancang untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan dengan memberikan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan pendapatan. BAZNAS juga secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ZIS melalui kampanye dan sosialisasi yang melibatkan berbagai media, seminar, dan workshop. Edukasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ZIS (Silastia, 2023).

Agar dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi, BAZNAS Kota Bandar Lampung secara rutin menyusun laporan keuangan dan kinerja pelaksanaan ZIS yang dapat diakses oleh publik. Laporan ini disusun dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA), yang memungkinkan BAZNAS Pusat untuk memantau dengan langsung rincian dana yang terkumpul dan didistribusikan. Selain itu, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga melakukan audit tahunan melalui pihak audit syariah kepatuhan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan bahwa pengelolaan ZIS berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Prinsip-prinsip pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung mencakup 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) yang mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, serta penerapan standar operasional prosedur

yang ketat dalam distribusi zakat, sehingga pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan profesional dan amanah (Befiarosa, 2023).

3. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Bandar Lampung memegang peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, berjalan dengan efektif dan efisien. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan utama zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pengkoordinasian ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kekosongan fungsi dalam pelaksanaan program-program yang dirancang.

Implementasi perencanaan pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung melibatkan berbagai bentuk pengkoordinasian, termasuk pengkoordinasian internal, eksternal, dan dengan berbagai stakeholder. Pengkoordinasian internal dilakukan melalui rapat rutin yang dipimpin oleh pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Rapat ini diadakan minimal sebulan sekali untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun. Dengan adanya koordinasi internal yang terstruktur, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap divisi bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain pengkoordinasian internal, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga menjalin pengkoordinasian eksternal dengan pemerintah daerah. Pimpinan BAZNAS berkomunikasi langsung dengan pejabat daerah, seperti Walikota Bandar Lampung, untuk menyampaikan program-program BAZNAS dan target yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan baik berupa dana APBD maupun fasilitas lainnya yang dapat memperkuat kegiatan sosial di bidang zakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah ini sangat penting untuk memperluas cakupan dan efektivitas distribusi zakat di masyarakat.

BAZNAS Kota Bandar Lampung juga mengkoordinasikan pengumpulan zakat dengan stakeholder, termasuk muzakki individu dan perusahaan. Koordinasi dengan muzakki ini tidak hanya melibatkan aspek pengumpulan zakat, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini dilakukan agar target dalam RKAT dapat tercapai dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban berzakat. Pengkoordinasian ini juga mencakup penggalangan dana yang dilakukan secara sistematis melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, pengkoordinasian antara BAZNAS Daerah dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat juga sangat penting. Koordinasi antar BAZNAS ini bertujuan untuk menyelaraskan target dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan di daerah dapat terintegrasi dengan agenda nasional BAZNAS. Jika terjadi kendala di tingkat daerah, BAZNAS Pusat berperan aktif untuk memberikan solusi dan membantu BAZNAS daerah agar tetap mencapai target yang diinginkan. Selain itu, apabila ada program BAZNAS Pusat yang relevan dengan kebutuhan di daerah, BAZNAS Daerah dapat bekerjasama untuk melaksanakan program tersebut.

Rapat koordinasi yang diadakan antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, yang dikenal sebagai Rakerda, juga merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengkoordinasian. Rakerda dilakukan minimal sekali setahun untuk memastikan bahwa visi dan agenda pengelolaan zakat di daerah selaras dengan kebijakan dan program nasional. Hal ini diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 33. Dalam rapat ini, berbagai kebijakan dan strategi pelaksanaan zakat dibahas untuk memastikan keberhasilan distribusi dan pengumpulan zakat secara nasional maupun lokal.

Dalam menjalankan seluruh proses pengelolaan ZIS, BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan. SIMBA adalah aplikasi yang dirancang untuk mengelola berbagai data penting terkait zakat, infak, dan sedekah, seperti data mustahik, muzakki, laporan arus kas, dan laporan distribusi. Dengan adanya SIMBA, seluruh data yang masuk dapat dipantau dan dikelola secara transparan. Selain itu, pelaksanaan hak amil juga diawasi melalui audit kepatuhan syariah serta Kantor Akuntan Publik (KAP), yang memastikan bahwa semua transaksi dan pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencatatan dan pengelolaan hak amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung juga dilakukan secara sistematis, di mana bagian amil memperoleh bagian maksimal sebesar 12,5% dari total dana zakat yang terkumpul. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam yang menetapkan bahwa bagian amil tidak boleh lebih besar dari yang diberikan kepada mustahik, yaitu fakir dan miskin. Pencatatan ini dilakukan secara terpisah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana. Selain itu, bagian amil yang digunakan untuk operasional, seperti biaya administrasi dan kegiatan operasional lainnya, harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Penelitian ini telah memberikan analisis mendalam mengenai pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BAZNAS Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan ini memastikan agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal bagi mereka yang berhak menerima, termasuk hak amil sebagai pihak yang bertugas mengelola dana. BAZNAS Kota Bandar Lampung telah berusaha menjalankan ketentuan ini dengan efektif.

Alokasi dana untuk amil diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam yang diakui dalam Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan, amil berhak mendapatkan alokasi maksimal 12,5% dari total dana zakat yang terkumpul. Apabila dana zakat tidak mencukupi untuk alokasi amil, BAZNAS dapat mengambil tambahan hingga 20% dari dana infak, sedekah, atau bantuan pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini merupakan upaya agar hak amil tetap terpenuhi tanpa mengorbankan dana yang dialokasikan untuk mustahik lainnya.

Namun, tantangan masih ada dalam hal peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Sebagai lembaga resmi, BAZNAS perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS melalui upaya yang lebih giat dalam sosialisasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang lebih menyeluruh dan terbuka, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi demi tercapainya pengelolaan dana yang lebih efisien, akuntabel, dan sesuai syariat.

Sebagai saran, BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya memperkuat strategi sosialisasi terkait penyaluran ZIS melalui BAZNAS, agar masyarakat lebih yakin dan terdorong untuk menyalurkan ZIS mereka ke lembaga yang sah dan diakui. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media komunikasi dan program edukasi yang lebih intensif di komunitas-komunitas masyarakat. Dengan demikian, pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS diharapkan dapat terus meningkat dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Ke depan, pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih transparan, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan pengelolaan dana yang tepat guna dan adil bagi semua pihak yang

membutuhkan. Melalui sinergi antara BAZNAS dan masyarakat, program ZIS diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2016. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andini Gita Octavia. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Illegal Di Bandar Lampung".
- Anwar, Ali Nurdin Anwar, et.al. 2017. *Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariah dan Implementasinya di Organisasi Pengelola Zakat*. Kasaba: Journal of Islamic Economy, Vol.10 No.2.
- Anwar, Nurfiah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindn Bestari.
- Haryanto, Dwi, 2021. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Gantara, Franky, dkk. 2022. *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No. 1.
- Hafizhan, Hilman, dkk. 2024. *Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Dana Amil, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*. STIE Indonesia Banking School: Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 20 No. 2
- Haryanto, Dwi. 2018. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah*. Tesis Pascasarjana IAIN Palangkaraya.
- Kemenag RI "Panduan Zakat Praktis". Jakarta: Direktus Pemberdayaan